

ABSTRAK

David Maulana Akbar, 18382011030, *Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Sosiologi Hukum Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Achmad Fauzi M.HI

Kata Kunci: Iddah, Peraturan Bupati Pamekasan, Sosiologi Hukum.

Dibuatnya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh Bupati Pamekasan kepada wanita PNS untuk mengantisipasi para wanita PNS ketika ditinggal mati suaminya. Peraturan tersebut seharusnya menjadi solusi bagi wanita PNS yang sedang menjalani iddah, namun fakta yang terjadi di Kecamatan Pademawu peraturan tersebut tidak berjalan dengan normal sebagaimana mestinya.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. 2) Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Pasal 8 Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris/penelitian lapangan dengan metode pendekatan sosio-legal. Dalam penelitian ini teori/ ilmu sosial yang peneliti gunakan adalah Sosiologi Hukum. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan belum berjalan sebagaimana mestinya karena para wanita PNS di Kecamatan Pademawu yang menjalani iddah sama sekali belum menerapkan peraturan Bupati Pamekasan tersebut. Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan para wanita PNS tersebut tidak menerapkan peraturan tersebut yaitu kurangnya informasi yang didapat dan kurangnya pemahaman tentang tujuan di dibuatnya peraturan tersebut. 2) Wanita PNS yang menjalani iddah belum sadar dan tau tentang tata cara pelaksanaan iddah seperti dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksadaran terhadap aturan hukum yang ada.